

Jakarta, (*Kompas*. 29-09-04) - Dalam sisa waktu pemerintahan Kabinet Gotong Royong yang tinggal beberapa minggu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Laksamana Sukardi mengganti sejumlah direksi dan anak perusahaan Holding Company PT Pupuk Sriwidjaja dalam rapat umum pemegang saham luar biasa yang berlangsung di Jakarta, Selasa (28/9).

Sebagian dari direksi yang diganti itu tidak lagi mendapatkan jabatan baru, sedangkan sebagian lagi diputar di pos baru yang masih ada di lingkup industri pupuk. Direksi pupuk yang diganti antara lain Direktur Keuangan M Alwin R Rosad diganti Wiyas Y Hasbu, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Petrokimia Gresik. Sementara itu, Direktur Pemasaran Petrokimia Gresik Ida Bagus Agra Kusuma menempati posnya yang baru sebagai Direktur Pemasaran PT Pupuk Kalimantan Timur. Susunan direksi baru PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Direktur Utama (Dirut) Dadang H Kodri, Direktur Teknik dan Pengembangan Sutarto Budidarmo, Direktur Produksi Indra Jaya, Direktur Pemasaran Bowo Kuntohadi, Direktur Keuangan Wiyas Y Hasbu, dan Direktur SDM & Umum Djafarudin Lexy. Dirut PT Pupuk Kaltim Omay K Wiraatmadja, Dirut PT Petrokimia Gresik Arifin Tasrif, Dirut PT Pupuk Iskandar Muda Hidayat Nyakman. Sementara Dirut Pupuk Kujang Aas Asikin Idat merupakan dirut baru yang menggantikan Dadang.

Membantah

Dirut PT Pusri Dadang Kodri, yang dihubungi se usai rapat umum pemegang saham luar biasa itu membantah tuduhan bahwa pergantian dilakukan karena ada latar belakang politik ketimbang tuntutan profesionalisme. "Semua isu itu tidak benar. Tidak benar pula kabar yang menyebutkan pergantian ini mendadak dan tanpa proses. Lebih tak benar lagi jika dikatakan para direktur pengganti maupun yang diganti cuma diundang melalui pesan pendek via telepon genggam dan bukan melalui surat," kata Dadang. Hal ini perlu ditegaskan untuk meluruskan berbagai kabar yang tidak benar. Informasi yang benar adalah pergantian ini dilakukan dalam proses yang benar dan tetap mengedepankan profesionalisme. "Pergantian itu tidak dilakukan diam-diam karena sejak akhir 2003 sudah ada rencana peremajaan direksi," ujar Dadang lebih lanjut.

Kronologisnya

Sebagai gambaran, kata Dadang, pada 7 November 2003 Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Kehutanan, Kertas, Percetakan, dan Penerbitan atas nama Menteri BUMN menyampaikan surat No S-527/MBU/ 2003 kepada Direksi dan Komisaris PT Pusri (Persero). Isi surat adalah meminta pihak Pusri menyampaikan nama-nama pejabat setingkat di bawah direksi (maksimum 10 orang) untuk masing-masing anggota holding sebagai bakal calon untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) ke Kementerian BUMN. Proses pun berlanjut sampai muncul surat dari Kementerian BUMN No S-219/MBU.3/2004 tanggal 20 Juli 2004, soal penunjukan konsultan dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan untuk calon direksi. Pada 24-25 Juli 2004 telah dilakukan tes terhadap para calon yang direncanakan menduduki jabatan direksi perusahaan di lingkungan PT Pusri. Selang sebulan kemudian, tepatnya tanggal 26-28 Agustus 2004, dilaksanakan penilaian kemampuan dan kepatutan untuk semua calon. Hasil dari tes plus wawancara para calon tersebut diserahkan kepada Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham pemerintah. Hasilnya Menteri BUMN dengan suratnya No S-480/MBU/2004 tanggal 9 September 2004 memutuskan nama-nama calon anggota direksi anak perusahaan PT Pusri yang baru menggantikan direksi lama, yang ditetapkan dalam

RUPSLB. "Kronologisnya seperti itu. Jadi, tidak ada yang mendadak. Semuanya melalui proses selama satu tahun. Hal ini mesti ditegaskan agar tidak timbul persepsi yang salah," katanya. Selain itu, jika tidak dilakukan pergantian, akan terjadi stagnasi di jajaran manajemen puncak maupun tengah. Bayangkan di lingkup industri pupuk ini sudah ada yang menjabat direksi sejak tahun 1990. "Oleh karena itu, proses pemilihan itu dilakukan secara bertahap dan melibatkan lembaga independen. Hasilnya seperti yang ada saat ini," kata Dadang H Kodri. (ast)